

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI
DALAM MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
TANGGAL 16 AGUSTUS - 30 OKTOBER 2023
(Masa Sidang Mulai Tanggal 16 Agustus s.d. 3 Oktober 2023
dan Masa Reses Mulai Tanggal 4 - 30 Oktober 2023)**

Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *juncto* Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 adalah sebagai berikut:

I. Kinerja Fungsi Legislasi

A. RUU USUL PEMERINTAH

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat-Rapat terkait RUU tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat dalam rangka menerima masukan:

a. 22 Agustus 2023,

Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN



b. 23 Agustus 2023,

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan LSM ((idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia), adti (Asosiasi Digital Trust Indonesia, LKHT (Lembaga Kajian Hukum Teknologi) UI, PR2Media (Pemantau Regulasi Regulator Media), KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).



2. Rapat Panja Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Komisi I DPR RI dalam rangka Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE:

a. 29 Agustus 2023,



b. 30 Agustus 2023,



c. 25 September 2023,



d. 26 September 2023,



e. 2 Oktober 2023,



B. RUU USUL INISIATIF DPR RI

RUU tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran)

Rapat Panja Penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU Penyiaran telah menyelesaikan penyusunan terhadap NA dan draft RUU tentang Perubahan atas UU Penyiaran. Selanjutnya Panja akan menyampaikannya hasil kerjanya kepada Rapat Intern Komisi I DPR RI.



C. RUU KUMULATIF TERBUKA

RUU tentang Pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir)

Pada tanggal 2 Oktober 2023 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Pemerintah (Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Pertahanan (Menhan), serta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk melaksanakan Pembicaraan Tingkat I dalam rangka pembahasan dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengesahan *Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapon* (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir). Setelah mendengarkan penjelasan Pemerintah, Pandangan Fraksi-Fraksi, dan setelah melaksanakan pembahasan terhadap Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk melanjutkannya pada Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk dapat disetujui menjadi undang-undang.



II. Kinerja Fungsi Anggaran

Berdasarkan penjadwalan Rapat Anggaran dari Badan Anggaran yang telah disampaikan kepada Komisi melalui Surat Badan Anggaran DPR RI Nomor: B/8607/AG.05.01/7/2023 tanggal 12 Juli 2023 perihal Penyampaian Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022 dan Rancangan Jadwal Pembahasan RUU tentang APBN TA 2024, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka membahas:

1. Pembahasan RKA Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 (31 Agustus 2023 - 7 September 2023);
2. Penyesuaian RKA Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024 (12 September 2023 - 14 September 2023).

yaitu:

- a. Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI
- b. Kementerian Luar Negeri (Kemlu);
- c. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) beserta KPI Pusat, KI Pusat, dan Dewan Pers

- d. Badan Intelijen Negara (BIN);
- e. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
- f. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas);
- g. Badan Keamanan Laut (Bakamla)
- h. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas);
- i. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
- j. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).





Setelah melaksanakan Raker dan RDP tersebut di atas, pada tanggal 14 September 2023 Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Intern dalam rangka rekapitulasi hasil pembahasan RKA Mitra Kerja Komisi I DPR RI TA 2024. Selanjutnya hasil rekapitulasi tersebut disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti.

III. Kinerja Fungsi Pengawasan

A. Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dengan Dirjen PPI Kemkominfo pada tanggal 19 September 2023 untuk mengetahui Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan. Setelah mendapatkan penjelasan mengenai hal tersebut, Komisi I DPR RI mendorong Dirjen PPI Kemkominfo untuk melakukan optimalisasi pengawasan dan pengendalian terhadap registrasi kartu seluler guna mengantisipasi penggunaan kartu seluler sebagai sarana penyebaran informasi hoaks, ujaran kebencian, disinformasi dan hal-hal lain yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu.



B. Panja Pengawasan Komisi I DPR RI

1. Panja BUMNIP

Panja BUMNIP Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP pada tanggal 11 September 2023 dengan:

- a. Deputi bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Bogat Widyatmoko, SE., MA;
- b. Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN, Dr. Mego Pinandito, M.Eng.;
- c. Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas, Marsma TNI Rolland Dulista G. Waha;
- d. Sestama BSSN; dan
- e. Dirjen Aptika Kemkominfo.

dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai :

- 1) Kebijakan strategis Indhan yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan Indhan nasional;
- 2) Kinerja holding BUMN Indhan untuk kepentingan bangsa dan negara;
- 3) Urgensi revitalisasi Indhan menuju Indhan yang unggul dan yang berdaya saing;
- 4) Tinjauan Indhan dari sisi SWOT; dan
- 5) Pendanaan untuk biaya investasi Indhan yang berdaya saing.

Keseluruhan materi presentasi yang telah disampaikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahan kajian Panja BUMNIP Komisi I DPR RI dalam merumuskan kesimpulan dan usulan rekomendasi yang akan disusun.



2. Panja Keamanan Laut

Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan CEO IOJI (Indonesia Ocean Justice Initiative): MAS Achmad Santosa, dan Director of Paramadina Graduate School of Diplomacy: Dr. Phil. Shiskha Prabawaningtyas, serta Pemerhati Kemaritiman/Wakil Bupati Natuna: Rodhial Huda, pada 19 Juni 2023 dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional.



C. Kunker Komisi I DPR RI

1. Kunker Spesifik

a. tanggal 24 – 26 Agustus 2023 dalam rangka:

- 1) mengetahui penguatan peran LPP RRI dan LPP TVRI sebagai media publik yang independen dan netral untuk penyiaran dan pemberitaan pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024; dan
- 2) mengetahui Deteksi Dini dan Cegah Dini Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Binda Bangka Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ke daerah sebagai berikut:

a) Nusa Tenggara Barat (Mataram)



b) Jambi (Kota Jambi);



c) Kepulauan Bangka Belitung (Pangkal Pinang).



b. tanggal 15 – 17 September 2023 dalam rangka:

- 1) mengetahui Deteksi Dini dan Cegah Dini Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Barat oleh Binda Jawa Barat;
- 2) mengetahui Kesiapan Korem 064/Maulana Yusuf Dalam Mendukung Pengamanan Pemilu 2024;
- 3) Mengetahui progres pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan Upaya Meminimalkan Kebocoran Data.

ke daerah sebagai berikut:

a) Jawa Barat (Bandung);



b) Banten (Serang);



c) Jawa Barat (Bekasi).



c. Tanggal 22 - 24 September 2023 dalam rangka:

- 1) Mengetahui Deteksi Dini dan Cegah Dini Tahapan Pelaksanaan Pemilu 2024 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wilayah Surakarta dan sekitarnya.
- 2) Mengetahui Penguatan Peran LPP TVRI Jawa Tengah sebagai Media Publik yang Independen dan Netral untuk Penyiaran dan Pemberitaan Pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilu 2024.

Ke daerah sebagai berikut:

a) Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta);



b) Jawa Tengah (Semarang);



c) Jawa Tengah (Solo).



d. Tanggal 27 - 29 September 2023 dalam rangka:

- 1) Mengetahui Kesiapan Kodam III/Siliwangi Dalam Mendukung Pengamanan Pemilu 2024;
- 2) Mengetahui Kesiapan Divisi Infanteri 1/Kostrad dalam Melaksanakan Tugas Pokok TNI dengan Dukungan Alutsista beserta Sarana dan Prasarana;
- 3) Mengetahui Untuk mengetahui Peran Kodiklat TNI dalam menyiapkan Kader Pemimpin TNI Maa Depan yang Berkarakter dan Profesional.

Ke daerah sebagai berikut:

a) J



(Bandung);



b) Jawa Barat (Depok);



c) Banten (Tangerang Selatan).



3. Kunker Reses

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 melakukan pengawasan pada tanggal 8 – 11 Oktober 2023 ke :

a. Bali (Denpasar);



b. Sumatera Utara (Medan);



c. Jawa Timur (Surabaya).



IV. PENUTUP

Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.

Jakarta, 16 Oktober 2023
KABAGSET. KOMISI I DPR RI,

SARTOMO, S.S., M.Si.
NIP. 196808111996031001